

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dinyatakan Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan tersebut juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan,

mulai dari RPJMD, RKPD setiap tahun tahunnya dan disusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ini semua adalah perencanaan yang dibuat kemudian dikukuhkan dalam perjanjian kinerja selanjutnya setelah setahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.

Metode Pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Target peningkatan dan penurunan sasaran strategis dapat diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

- b) Membandingkan realisasi kinerja hingga tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c) Mengkategorikan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan menggunakan kriteria Interval dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi
3.	66 % ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Rata-rata capaian kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikategorikan “Tinggi.” Capaian Kinerja sebesar 96,48%, dari 22 indikator kinerja dan 13 capaian sasaran indikator terdapat 2 capaian sasaran indikator dengan kategori sedang pada indikator kinerja utama Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan PDRB sektor unggulan. Dari nilai capaian indikator terendah adalah Pertumbuhan nilai investasi (13,43) sedangkan Capaian Kinerja tertinggi adalah indikator Indeks Profesional ASN (123,82%). Rincian capaian Kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	69,0	60,92	88.28%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	73.54	82.31	111.92%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76.34	76.94	100,78%	Tinggi
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sector unggulan	1,07	0,64	59,81%	Sedang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.55	82,32	111.92%	Sangat Tinggi
		Bertambahnya nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	18,90	2,54	13,43%	Rendah
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	B (67.00)	BB(72.34)	107.97%	Tinggi
			Nilai Predikat SAKIP	BB(71.00)	B(61.27)	86.29%	Tinggi
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP*	100%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	(3.90)	(2,63)	67,43%	Sedang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (86.00)	B (85.16)	99.02%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	(45)	42,97	95,48%	Tinggi
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	52	64,39	123,82%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	94,23	100	106,12%	Tinggi
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	59.55	68.28	114.65%	Sangat Tinggi
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	49,50%	49,50%	100%	Tinggi
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	40%	9,70%	24,25%	Rendah
			Persentase Permukiman yang Tertata	40%	18.29	45.72%	Rendah
			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	34.37%	34.61	100.69%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.74	0.58	78,37%	Tinggi
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.67	0.33	49,27%	Rendah
		Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Persentase Titik Lokasi / Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	100	100	100%	Tinggi

3.2 Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai, serta evaluasi perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja atas indikator kinerja utama yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja *output* dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

3.2.1 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

TABEL 3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pendidikan	60.41	69.0	60.92	88.28%	78.6	77.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja				88.28%	-	77.5%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan” dengan indikator Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 69.0 untuk mencapai kategori tinggi namun hanya terealisasi sebesar 60,92 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 88,28% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 77,5% ini juga masih dalam kategori

capaian “Tinggi” dan pencapaian kinerja masih cukup berhasil.

Indeks pendidikan, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil rata-rata angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata angka lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui formulasi perhitungan pada penjelasan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Dimensi Pendidikan} \quad I_{HLS} &= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} & I_{HLS} &= \frac{12,88 - 0}{18 - 0} \times 100\% \\
 & & &= 71,56 \\
 I_{RLS} &= \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} & I_{RLS} &= \frac{7,34 - 0}{15 - 0} \times 100\% \\
 & & &= 48,93 \\
 I_{pendidikan} &= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} & I_{pendidikan} &= \frac{71,56 + 48,93}{2} \\
 & & &= 60,24
 \end{aligned}$$

Indeks pendidikan ini merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Jika dilihat dari tren data perkembangan HLS, dan RLS lima tahun terakhir dapat digambarkan tabel sebagai berikut :

TABEL 4.
Indeks Capaian HLS dan RLS T.A 2018-2023

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Harapan Lama Sekolah	12,14	12,32	12,75	12,81	12,89	13,05
Rata-rata Lama Sekolah	6,69	6,70	6,91	7,17	7,38	7,40

Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2023.

Harapan lama sekolah dalam lima tahun mengalami kenaikan, dari 12,14 pada tahun 2018 sampai kemudian pada tahun 2023 menjadi 13,05, ini menunjukkan terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sebesar 0,91 poin jika di rata-ratakan naik 0,16 poin setiap tahunnya. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. Dapat dijelaskan bahwa pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,40 poin dengan capaian meningkat dari tahun 2022 naik sebesar 0,02 poin.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas dengan pembenahan perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, serta berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan pendidikan vokasi juga terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing anak-anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, penguatan karakter juga dilakukan dengan pendekatan kebudayaan.

Permasalahan kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks pendidikan antara lain adalah:

- a. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan masih hanya sebatas baca tulis dan hitung, sehingga

mereka merasa cukup menyekolahkan anak hanya sampai jenjang SD, SMP atau SMA/Sederajat.

- b. Kondisi ekonomi orang tua yang terbatas, sehingga enggan untuk memasukan/menyekolahkan anak.
- c. Masih kurangnya tenaga pendidik/guru dan pendistribusian guru yang belum seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi dibawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*) dan ketidak sesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajar/diampu (*mismatched*) oleh guru di daerah.
- d. Minimnya alokasi pembiayaan anggaran dari dana APBD maupun sekolah dalam peningkatkan mutu kompetensi guru dalam wawasan pengajaran, mengakibatkan rendahnya kualitas pengajaran dan semangat guru dalam pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, sehingga kurang berjalan dengan konsep KKG dan MGMP Berbasis zonasi atau kewilayahan yang telah dibentuk. Kegiatan pemberdayaan tersebut memberikan ruang bagi guru untuk dapat saling berbagi pengalaman dan ilmu dengan guru- guru yang berada dalam jangkauan wilayahnya terkait peningkatan model pembelajaran di kelas yang lebih berkualitas.
- e. Masih lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran dinas pendidikan sehingga sering tidak tepat sasaran dalam menentukan prioritas-prioritas kebutuhan sekolah yang lebih urgen untuk penggunaan azas dan manfaat bagi sekolah.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai indeks pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi perencanaan dan perbaikan dalam proses perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan skala prioritas. Serta membuat data base perencanaan pembangunan sarana prasarana sekolah, mengupdate data base

pokok pendidikan sesuai dengan data Dapodik pendidikan yang akurat sesuai yang diamanahkan.

- b. Pengembangan mutu buku pendidikan, pembinaan kecakapan dan kompetensi guru dalam pengembangan pemanfaatan ICT serta fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- c. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing seperti pengembangan kurikulum, penyediaan materi-materi pengajaran, pengembangan model unggulan.
- d. Pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk biaya transportasi siswa yang telah di alokasikan di BOSDA, Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Siswa Miskin Daerah, untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana pendidikan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik sekolah dan operasional sekolah, dan Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 5.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 55.180.588.813,00	Rp. 38.358.674.268,00	69,51%
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 259.095.400,00	Rp. 121.955.000,00	47,07%
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 6.719.527.598,00	Rp. 3.590.209.624,00	53,43%
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.075.847.836,00	Rp. 523.287.900,00	48,64%
	Total	Rp. 63.235.059.647,00	Rp. 42.594.126.792,00	67,35%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 42.594.126.792,00 dari anggaran sebesar Rp. 63.235.059.647,00. Jika dari realisasi keuangan 67,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,28%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 20,93%.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh mutu pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan penduduk suatu bangsa, maka akan memberi pengaruh positif terhadap kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, melalui suatu system pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih meningkat. Sarana Pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain 21 Taman Kanak-Kanak, 56 Sekolah Setingkat SD, 24 Sekolah Setingkat SMP, dan 6 Sekolah Setingkat SMA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a) TK berjumlah 21 sekolah, terdiri 9 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta.
 - b) SD/MI berjumlah 51 sekolah, terdiri 43 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta.
 - c) SMP/MTs berjumlah 27 sekolah, terdiri 22 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta.
2. Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi Guru TK berjumlah 83 orang, meliputi 45 orang guru di TK negeri dan 38 orang guru di TK swasta. Sedangkan guru SD/MI berjumlah 534 orang, meliputi 476 orang guru negeri

dan 58 orang guru swasta. Guru SMP/MTs berjumlah 393 orang, meliputi 326 orang guru negeri, 67 orang guru swasta.

3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (BOS Afirmasi) baik dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mewujudkan 8 standar pendidikan nasional, seperti misalnya untuk pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa, dan pemeliharaan ringan sarana prasarana, dan lain sebagainya.
4. Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN.

3.2.1 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dengan indikator Indeks kesehatan dengan target 2023 sebesar 73.54 untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 82,31 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 111,92% dan ini termasuk predikat “ Sangat Tinggi”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

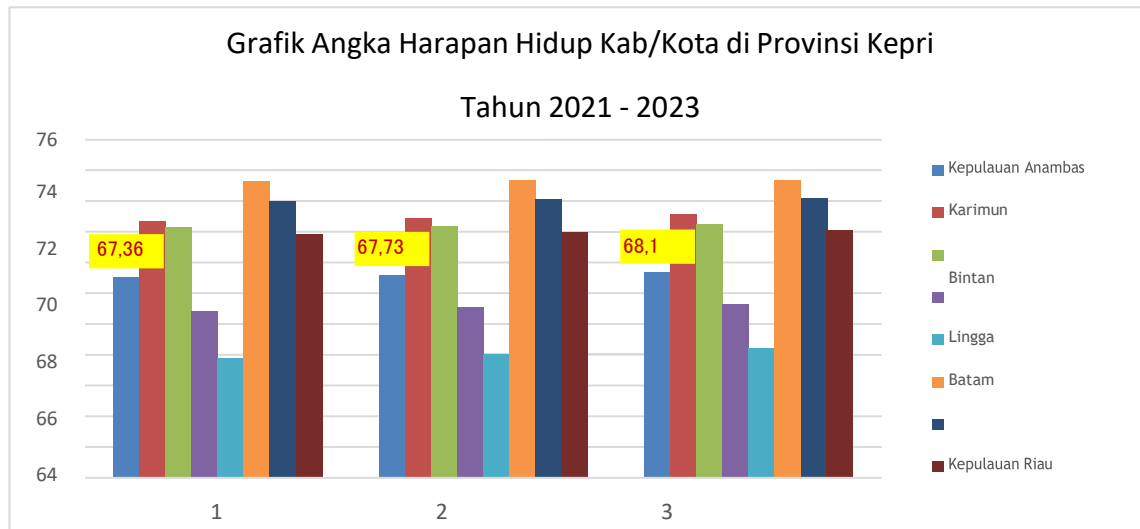
TABEL 6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kesehatan	73.43	73.54	82.31	111.92%	74.45	110.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja				111.92%	-	110.5%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2023.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir).

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ini adalah upaya untuk pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, hal ini bisa dilihat dari penjelasan data tren UHH tiga tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2023

Usia Harapan Hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar, semakin tingginya angka harapan hidup di suatu wilayah menunjukkan Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya. Kondisi tersebut menggambarkan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka di tahun 2023 Umur Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Mengalami peningkatan 0,37 Tahun yang artinya terdapat perbaikan status kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga bayi yang dilahirkan pada tahun 2023 mempunyai harapan hidup mencapai umur 67,73 tahun lebih

panjang 0,37 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2022. Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional 71.85 Tahun, maka Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai Umur Harapan Hidup (UHH) 3,75 Tahun lebih rendah dari nasional.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adalah:

- a. Pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah faktor pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik. Dalam hal pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah beroperasinal satu rumah sakit tambahan di wilayah Ibu kota Kepulauan Anambas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yang siap melayani masyarakat. Selain itu juga dalam hal pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga bekerjasama dengan RSUD Provinsi Kepri dan RSUD Pemko Batam sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta perbaikan kesehatan lingkungan juga merupakan bagian dari kunci keberhasilan peningkatan UHH. Pencapaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik, dan ini bisa dilihat dari hasil realisasi akreditasi unit pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi sampai tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 7.
Realisasi Target Akreditasi Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2022-2023

NO	UNIT PELAYANAN KESEHATAN	REALISASI 2022-2023	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4
1.	RSUD Jemaja	Utama	Sangat Baik
2.	RSUD Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
3.	RSUD Tarempa	Utama	Sangat Baik
4.	Puskesmas Tarempa	Madya	Sangat Baik

5.	Puskesmas Letung	Utama	Sangat Baik
6.	Puskesmas Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
7.	Puskesmas Siantan Tengah	Paripurna	Sangat Baik
8.	Puskesmas Siantan Timur	Paripurna	Sangat Baik
9.	Puskesmas Siantan Selatan	Utama	Sangat Baik
10	Puskesmas Jemaja Timur	Paripurna	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sedangkan faktor pendukung pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) di bidang lainya adalah meningkatnya status pendidikan, pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan status sosial ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan akses layanan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berdampak memperpanjang usia harapan hidupnya.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) adalah masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan, Masih kurangnya kesadaran individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain:

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.
- Peningkatan Akses, mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dan mempersiapkan kembali pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan padatahun anggaran 2023.
- Peningkatan perbaikan status gizi keluarga.
- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan Peningkatan Jumlah dan kompetensi tenaga Kesehatan.

Tindak lanjut dan upaya yang dilakukan pelaksanaan program kegiatan yaitu persiapan dalam mengakreditasi rumah sakit, puskesmas-puskesmas yang ada dikecamatan terutama peningkatan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan yang di

bangun dan rehabilitasi, melengkapi prasarana alat-alat kesehatan (Alkes), dan ini merupakan program prioritas dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang harus disiapkan untuk masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf.

Sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 8.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Kualitas dan Akses Kesehatan

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 34.420.741.564,-	Rp. 31.417.915.939,-	91,27%
2.	Program Peningkatan kapasitas sumber daya Manusia Kesehatan	Rp. 828.349.428,-	Rp. 586.527.255,-	70,8%
3.	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 159.999.700,-	Rp. 148.075.100,-	92,54%
4.	Program pengendalian penduduk	Rp. 141.800.000,-	Rp. 132.740.000,-	93,61%
5.	Program pengendalian keluarga berencana	Rp. 1.316.218.000,-	Rp. 1.082.620.580,-	82,25%
6.	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rp. 755.004.000,-	Rp. 746.081.900,-	98,81%
	Total	Rp. 37.622.112.692,-	Rp. 34.113.960.774,-	90,57%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 34.113.960.774,- dari anggaran sebesar Rp. 37.622.112.692,-. Realisasi keuangan sebesar 90,57% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 21,35%.

3.2.3 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator Indeks Purchasing Power Parity mencapai 100,78% dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76.05	76.34	76.94	100.78%	77.26	99.58%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100.78%		99.58%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

Jika dilihat dari tabel diatas hasil realisasi yang dicapai sebesar 76,94 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,78% dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ingin dicapai sebesar 77.26 dengan capaian sebesar 99,58% berarti target ini bisa tercapai sebelum target akhir pada RPJMD pada tahun 2026.

Indeks Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2017=100, jika indeks Pengeluaran per kapita disesuaikan telah mencapai Rp 12.495.000 pada tahun 2023, meningkat Rp 358.000 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 kondisi perekonomian sudah mulai pulih, tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum pandemic Covid-19.) IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 tumbuh 3,19 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya. Di provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas menempati posisi ke lima daritujuh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi, IPM

Kabupaten Kepulauan Anambas masih lebih rendah dibanding IPM Kepulauan Riau sebesar 79,08 hal ini berdasarkan rata-rata statistik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada <https://anambaskab.bps.go.id>.

TABEL 10.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(Juta Rupiah/Orang/Tahun) 2021-2023

Wilayah	Pengeluaran Perkapita		
	2021	2022	2023
Kepulauan Anambas	11 950,00	12 137,00	12 495,00

Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. IPM Kepulauan Anambas tahun 2023 mencapai 72,80, meningkat 3,19 jika dibandingkan tahun 2022.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 11.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp. 20.000.000,-	00	-
2.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp. 204.021.522,-	Rp. 200.620.806	98,33%
3.	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp. 103.422.165,-	Rp. 48.745.386,-	47,13%
4.	Program penetapan tenaga kerja	Rp. 74.679.272,-	Rp. 40.679.047,-	54,47%
5.	Program hubungan industrial	Rp. 1.864.957.900,-	Rp. 1.570.557.077,-	84,21%
6.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 11.737.703.969,-	Rp. 8.562.700.810,-	72,95%
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.980.263.437,-	Rp. 2.493.377.918,-	83,66%
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 305.199.800,-	Rp. 100.329.092,-	32,87%
9.	Program penyediaan pengembangan sarana pertanian	Rp. 533.238.118,-	Rp. 343.464.060,-	64,41%
Jumlah		Rp. 17.823.486.183,-	Rp. 13.360.474.196,-	74,95%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP & DKUMPP Kab. Kepulauan Anambas 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 13.360.474.196,- dari anggaran sebesar Rp. 17.823.486.183,- atau sebesar 74,95% Realisasi keuangan, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,78%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 25,83%.

3.2.4 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 4: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Perikanan dan Pariwisata) dengan realisasi sebesar 0,64 dan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 59,81%, ini termasuk predikat “**Sedang**”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

TABEL 12.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,39	1,07	0,64	59,81%	6,60	9,69%
Rata-Rata Capaian Kinerja				59,81%		9,69%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya PDRB sector unggulan (perikanan dan pariwisata) yang berkelanjutan, dari Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 1,07 untuk mencapai kategori baik dan hanya terealisasi sebesar 0,64 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 59,81% dan ini termasuk predikat “**Sedang**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target

akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 9,69% ini masih dalam kategori Rendah dan membutuhkan capaian sebesar 90,31% untuk mencapai kriteria tinggi dan baru bisa dikategorikan pecapaian berhasil.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dilakukan dengan cara membandingkan antara PDRB tahun 2023 dikurangi PDRB tahun 2022. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Pertumbuhan PDRB sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melalui perikanan dan pariwisata.

Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

➤ **Peningkatan Produksi Perikanan**

Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh armada penangkapan ikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mencapai 26.957 ton. Produksi perikanan tangkap tersebut mengalami peningkatan 3.182 ton dibandingkan tahun 2022. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini berbanding lurus dengan bertambahnya armada penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan pada tahun 2023. Capaian produksi ini disebabkan oleh penambahan armada penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang baru dilaksanakan, peningkatan produksi perikanan tangkap berkaitan juga dengan

semangat seluruh pelaku usaha perikanan tangkap untuk bangkit dan meningkatkan perekonomian.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, penanaman modal/investasi untuk pengembangan usaha, inovasi teknologi dan skill yang mumpuni. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, upaya pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan tantangan yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pendapatan per kapita, diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat.

Masa Era desentralisasi, proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini mulai dilakukan proses bottom up planning secara lebih intensif, sehingga peran pemerintah daerah menjadi semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut memberikan makna bahwa kelengkapan data yang merupakan ukuran kuantitatif sangat diperlukan dalam menentukan perencanaan, monitoring maupun evaluasi pembangunan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Data statistik menjadi dasar pijakan untuk menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat dan optimal. Demikian juga untuk monitoring dan mengevaluasi hasil pembangunan dibutuhkan data statistik agar kinerja dan capaian pembangunan terukur. Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 19.241,49** Miliar

Rupiah, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 19.909.09* miliar rupiah. Apabila mengeluarkan sector migas PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 3.520,83 Miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3.272,52 miliar rupiah.

➤ **Peningkatan Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu unsur penunjang dalam peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, Unsur Pariwisata didukung melalui daya saing dengan dasar peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan kebudayaan sehingga menjadi daya Tarik wisatawan. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki hotel berbintang, akan tetapi terdapat 23 penginapan yang tersebar diberbagai kecamatan yang siap melayani para wisatawan untuk berlibur ke kabupaten Kepulauan Anambas. Rata-rata lama menginap tamu domestik dan asing pada tahun 2023 berjumlah 1,1 orang setiap bulannya. Tingkat penghunian kamar di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 24,16 kamar setiap bulannya.

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh DPPK Kabupaten Kepulauan Anambas. Solusi yang dapat dilakukan atas kurangnya kualitas SDM ini adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan pegawai.
- b. Indikator pada level impact dan Outcome pada Bidang Ketahanan Pangan umumnya bersifat fisik (dokumen), sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif maka diharapkan pada tahun berikutnya

dokumen yang dihasilkan dapat didiseminasikan kepada seluruh pihak yang terkait.

Sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 13.

Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 99.646.660,-	Rp. 72.902.706,-	73,16%
2.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 151.820.400,-	Rp. 137.875.000,-	90,81%
3.	Program Standardisasi dan perlindungan Kosumen	Rp. 67.631.400,-	Rp. 63.677.400,-	94,15%
4.	Program perencanaan dan pembangunan industri	00	00	-
5.	Program Penyediaan Pengembangan sarana pertanian	Rp. 1.739.435.615,-	Rp. 1.173.307.992,-	67,45%
6.	Program Pengendalian Kesehatanhewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Rp 505.780.345,-	Rp 209.133.018,-	41,35%
7.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.684.792.252,-	Rp 1.377.406.531,-	81,76%
8..	Program Peningkatan daya tarik Destinasi Parawisata	Rp. 3.021.500.000,-	Rp. 1.163.744.808,-	38,51%
9.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 5.733.000.000,-	Rp. 1.802.313.896,-	31,43%
10.	Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	Rp. 3.322.466.700,-	Rp. 1.305.437.720,-	39,29%
	Total	Rp. 16.326.073.372,-	Rp. 7.305.799.071,-	44,74%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP & DKUMPP KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.305.799.071,- dari anggaran sebesar Rp. 16.326.073.372,- atau 91,54%. Realisasi keuangan sebesar 44,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 59,81%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 15,07%.

3.2.5 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penurunan pencemaran lingkungan hidup” dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kinerja sebesar 111,92% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 14.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks kualitas lingkungan hidup	73.46	73.55	82,32	111,92%	74.34	110.73%
Rata-Rata Capaian Kinerja				111,92%		110.73%

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah 82,32% mengalami peningkatan sebesar 8,86 point jika dibandingkan pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2023 yang sebesar 72,54 IKLH, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah diatas rata-rata nasional dimana realisasinya lebih tinggi sebesar 9,78 point.

Fokus IKLH adalah pada media lingkungan air, udara dan lahan/hutan. Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan

BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati belum menjadi indikator dalam perhitungan IKLH.

Pada IKLH 2012, struktur IKLH relatif sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 (tiga) indikator, namun ada perubahan dalam pembobotan. Hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena banyak diwakili 1 (satu) indikator, yaitu tutupan lahan, maka bobotnya lebih besar dibandingkan indikator lainnya. Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkantoran. Indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Struktur IKLH dan Tabel 16.

TABEL 15.
Indikator dan Parameter IKLH

No	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
1.	Kualitas Udara	SO ₂	0.405	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		NO ₂		
2.	Kualitas Air Sungai	TSS	0.376	
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
	Total-Coliform			
3.	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0.219	

$$\text{IKLH KABUPATEN/KOTA} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Perhitungan nilai indeks kualitas air mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air). Indeks kualitas udara mengacu pada referensi standar internasional, yaitu WHO dan European Union. Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar ideal tutupan hutan. Esensi dari IKLH yang dilihat berdasarkan indikator media adalah sebagai berikut:

1. Udara yang secara kabupaten memiliki angka indeks 89,94 termasuk kategori baik.

- ✓ Titik pantau dilakukan pada empat lokasi antara lain area transportasi, area industri, area perkantoran dan area perdagangan.
- ✓ Parameter SO_x kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter NO_x kecenderungannya rendah.

2. Air yang secara kabupaten memiliki angka indeks 50,00 termasuk dalam kategori Sedang.

- ✓ Titik pantau dilakukan pada dua lokasi yaitu Embung Gunung Lintang dan Air Terjun Temburun.
- ✓ Parameter TSS kecenderungannya rendah.
- ✓ Parameter DO kecenderungannya rendah, meskipun ada satu lokasi yang kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter BOD kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter COD kecenderungannya tinggi.
- ✓ Parameter Fosfat pada tiga lokasi menunjukkan kecenderungan tinggi.
- ✓ Parameter Fecal Coli juga menunjukkan kecenderungan tinggi.
- ✓ Pada umumnya kondisi air yang ada di kabupaten kepulauan anambas masih mengkhawatirkan terutama karena parameter fecal coli yang masih tinggi.

3. Tutupan Hutan yang secara kabupaten memiliki angka indeks 83,27 yang dapat diartikan berada dalam kondisi relatif Baik.

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah 82,32 berada pada kategori baik. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16.
Hasil IKLH dalam Kategori

IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasari pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Pembagian ini masih dapat disempurnakan lagi seiring upaya pencapaian dalam membangun IKLH yang ideal. Kategorisasi penjelasan kualitatif ini dapat juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan penggunaan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami sebagai bahan komunikasi, terutama bagi publik. Untuk kategori “Sangat baik” berada pada posisi mempertahankan dan juga selalu berupaya untuk meningkat pada posisi “Unggul”. Sedangkan kategori “Kurang” bahkan “sangat kurang” dapat dijadikan bahasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah telah menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2022-2126. Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan, baik dipusat maupun daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2022-2026 menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada posisi 73,55 pada tahun 2023. Untuk mencapai target ini, tentu diperlukan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 17.
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penurunan
Pencemaran Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp. 298.417.236,-	Rp. 772.541.239,-	96,76%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 649.297.850,-	Rp. 546.286.911,-	84,14%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 107.750.000,-	Rp. 14.651.472,-	13,60%
4.	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati	Rp. 102.660.071,-	Rp. 28.275.100,-	27,54%
5.	Program pembinaan dan pengawasan PPLH	Rp. 50.000.000,-	Rp. 30.087.220,-	60,17%
6.	Program Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 130.560.150,-	Rp. 67.847.200,-	51,97%
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.139.050.829,-	Rp. 949.905.303,-	83,39%

8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 15.055.533.216,-	Rp. 11.078.746.775	73.59%
9.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 8.604.144.184,-	Rp. 4.718.226.002	54.84%
Jumlah		Rp. 40.775.177.153,-	Rp. 30.582.353.589	75.04%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 30.582.353.589,- dari anggaran sebesar Rp. 40.775.177.153,- atau 92,76%. Realisasi keuangan sebesar 75.04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 36,88%.

3.2.6 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 6: Bertambahnya Nilai Investasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Bertambahnya Nilai Investasi” dengan indikator pertumbuhan nilai investasi dengan capaian kinerja sebesar 13,43% dengan predikat “**Rendah**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 18.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Pertumbuhan Nilai Investasi	16,86	18,90	2,54	13,43%	18,90	13,43%
Rata-Rata Capaian Kinerja				13,43%		13,43%

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2023

Nilai Investasi PMA dan PMDN

Nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2023 dapat disajikan realisasi sebesar Rp. 201,552,453,012 dengan target pertumbuhan nilai investasi sebesar 18,90% dengan realisasi pertumbuhan nilai investasi adalah sebesar 2,54% dengan capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi 13,43% dengan kategori “Rendah”.

Nilai/Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun asset berharga lainnya kedalam suatu benda, Lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan jumlah nominal yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan per Triwulan untuk skala usaha menengah dan besar, dan per Semester untuk skala usaha kecil.

Target Investasi Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 250,000,000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) yang di bagi berdasarkan peluang investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang pencapaian dari target keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah Rp. 30.000.000.000.000 (Tiga Puluh Triliun Rupiah). Sesuai dengan penarikan data dari system OSS-RBA, terdapat 142 pelaku usaha yang menjalankan usaha di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tergolong kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang terdiri dari 99 pelaku usaha UMK dan 43 pelaku usaha Non UMK.

Setelah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di verifikasi oleh tim Verifikator, dapat ditarik nominal realisasi investasi per-triwulan maupun per-semester pada tahun 2023 dengan rincian:

1. Triwulan I berjumlah Rp. 154,266,006,403.91 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Empat Ratus Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 149,439,806,403.91 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 4,826,200,000.00 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Triwulan II berjumlah Rp. 11,727,470,493.83 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 9,917,470,493.83 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh

Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 1,810,000,000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

3. Triwulan III berjumlah Rp. 8,122,871,656.47 (Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 7,727,071,656.47 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 395,800,000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Triwulan IV berjumlah Rp. 11,973,198,808,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan PMA sebesar Rp. 2,508,598,808 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 9,464,600,000.00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
5. Semester I berjumlah Rp. 5,748,262,090 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) yang mana dari keseluruhan yang melaporkan LKPM pada Semester I adalah pelaku usaha UMK dan merupakan PMDN semua.
6. Semester II berjumlah Rp. 9,714,643,560.00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Limas Ratus Enam Puluh Rupiah) yang mana dari keseluruhan yang melaporkan LKPM pada Semester I adalah pelaku usaha UMK dan merupakan PMDN semua.

Dari rincian diatas, dapat di Tarik nominal realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp.201,552,453,012.99 (Dua Ratus Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Belas Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan PMA sebesar RP. 169,530,787,460.78 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan PMDN sebesar Rp. 32,021,665,553.00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Puluh Sati Juta Enam Ratus

Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Rincian total nominal ini di rekapitulasi dari total nominal realisasi investasi TW I, TW II, TW III, TW IV, Semester I dan Semester II 2023 per Tanggal 16 Februari 2024.

Realisasi investasi belum bisa dicapai maksimal dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Masih ada perusahaan yang belum migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS-RBA.
- 2) Kurangnya informasi dan sosialisasi OSS-RBA ke perusahaan perusahaan termasuk kewajiban menyampaikan LKPM.
- 3) Masih ada perusahaan yang belum membuat LKPM secara periodik dan benar.
- 4) Adanya realisasi investasi LKPM yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan perusahaan.
- 5) Adanya perusahaan dengan 1 NIB memiliki banyak KBLI, namun tidak semua KBLI yang dimiliki dilaporkan LKPM nya.
- 6) Masih banyak perusahaan yang izin PKKPR nya belum rampung, sehingga perusahaan belum bisa membangun.
- 7) LKPM di Aplikasi OSS hanya 99 UMK dan 43 Non UMK yang bisa di periksa.
- 8) Jaringan yang belum stabil karena di pulau-pulau.
- 9) Jarak tempuh yang jauh dari DPMPSTP, sehingga jika tidak mengerti tata cara pelaporan, pelaku usaha memilih untuk tidak melaporkan LKPM atau realisasinya dibuat nol.
- 10) Masih rendahnya capaian realisasi investasi.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 19.

Program dan Anggaran Sasaran Bertambahnya Nilai Investasi.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pelayanan penanaman modal	Rp. 422.881.600,-	Rp. 411.146.815,-	97.22%
2.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 521.700.000,-	Rp. 327.490.000,-	62.77%
Jumlah		Rp. 944.581.600,-	Rp. 738.636.815,-	78.19%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 738.636.815,- dari anggaran sebesar Rp. 944.581.600,- atau 78.19%. Realisasi keuangan sebesar 78.19% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 13.43%, maka efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 64.78%.

3.2.7 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparandan Akuntabel

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 20.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	CC 57,01	B 67.00	BB (72,34)	107.97%	BB (75.00)	96.45%
Nilai Predikat SAKIP	B (60.11)	BB (71.00)	B (61.27)	86.29%	A (81.00)	75.64%
Opini BPK RI Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP*	100%	WTP	100%
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.70*	(3.90)	(2.63)	67.43%	Sangat Tinggi (4.30)	61.16%
Indeks Layanan Publik (IKM)	80.69	B (86.00)	85.16	99.02%	A (89.87)	94.75%
Rata-Rata Capaian Kinerja						

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja BAPPEDA

➤ Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah, kualitas tatakelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-

program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah. Adapun bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dari tahap ke tahapan sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi General;
- b. Reformasi Birokrasi Tematik.

Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah BB (72,34). Dari penyajian data realisasi nilai indeks RB pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 107,97%, ini adalah pencapaian dikategorikan “ Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 15,33 poin dalam indeks skor penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada beberapa hal yang harus disempurnakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah:

1. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) - Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efsiensi;
2. Menetapkan perkara tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, melalui perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD, penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan;
4. Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi;
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Profesionalitas dan Pengorganisasian Statistik;

6. Melanjutkan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan;
7. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
8. Mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya - Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual;
9. Memastikan rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual.

➤ **Nilai Predikat SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja, pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah 61,27 atau sebesar 86,29%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 1,16. Berdasarkan hasil tersebut ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan SAKIP diantaranya adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis pada beberapa Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART) dan cukup serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan belum berdampak

langsung bagi masyarakat;

- b. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
- c. Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis atau *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- d. Rencana aksi sudah dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah, namun belum seluruh rencana aksi ini dilengkapi dengan kegiatan dan sub-kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja;
- e. Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada tingkat pusat maupun sebagian besar Perangkat Daerah sudah mencakup informasi terkait dengan formulasi perhitungan dan sumber data. Namun demikian, masih ada sebagian kecil unit kerja yang belum menyertakan formulasi perhitungan pada indikatornya;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki aplikasi SIANTAN sebagai *tools* manajemen kinerja untuk memantau realisasi fisik dan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah, namun demikian belum seluruhnya disiplin dalam mengunggah/melaporkan serapannya, sehingga manfaat dari aplikasi ini dirasa kurang maksimal;
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara elektronik, selain itu pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum disusun;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih

berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya;

- e. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah belum merata. Masih ditemui laporan kinerja pada Perangkat Daerah yang tidak menampilkan capaian atas kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja pada sebagian Perangkat Daerah belum menyajikan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan target tahun akhir periode Renstra serta perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b. Informasi kinerja yang dituangkan baik dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pedoman pelaksanaan evaluasi internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah saat ini sedang disusun;

- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan evaluasi AKIP internal pada sebagian besar Perangkat Daerah serta telah melakukan monitoring atas tindak lanjut dari laporan tersebut. Namun demikian, laporan hasil evaluasi tersebut masih belum memberikan temuan dan rekomendasi yang spesifik serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada beberapa merekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented), memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** ('Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound,) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis atau *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang

baik;

- 4) Melengkapi manual IKU pada Perangkat Daerah dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun serta melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses akuntabilitas;
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung pengukuran kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
- 7) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 8) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja terutama pada level unit kerja, diantaranya dengan menyajikan realisasi capaian dengan target yang diperjanjikan, perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra, serta realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/

rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja ditahun selanjutnya;

- 10) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
- 11) Menyelesaikan regulasi terkait dengan pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP internal yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 12) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
- 13) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Adapun nilai dari hasil evaluasi AKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 21.
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Instansi	Tahun 2023	
		Bobot Nilai	Nilai Evaluasi
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	60,05	B
2.	Sekretariat DPRD	56,25	CC
3.	Inspektorat	72,16	BB
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	61.10	B

5.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	66.10	B
6.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59,66	CC
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.75	B
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	67.55	B
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71,85	BB
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,10	BB
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	63,76	B
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	61.21	B
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.61	B
14.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	34,21	D
15.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	72,70	BB
16.	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	77.41	BB
17.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	69,66	B
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	71,86	BB
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	68,26	B
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,06	B
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81,75	BB
22.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	65,75	B
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,30	B
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	69,76	B

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi yang digunakan demi menangani faktor kegagalan tersebut, antara lain adalah:

- a. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan;
- b. Hasil Evaluasi Internal di dokumentasikan;
- c. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan;

Upaya yang dilakukan guna keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- a. Seluruh Perangkat Daerah menyusun cascading berpedoman Renstra dan RPJMD;
- b. Mereview dan merevisi Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- c. Mereview dan merevisi Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai IKU yang terbaru melalui pendampingan dan desk Renstra Perangkat Daerah oleh Tim Review;
- d. Membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Perangkat

Daerah beserta perubahannya sampai dengan eselon III bahkan kinerja individu;

- e. Membuat rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani;
- f. Menggunakan aplikasi e-sakip sebagai upaya penguatan dan transparansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan. Hasil evaluasi internal tersebut di dokumentasikan serta ditindaklanjuti;
- h. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

TABEL 22.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.491.644.250,-	Rp. 1.036.239.500,-	71,27
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 947.502.100,-	Rp. 497.200.546,-	52,47
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 201.183.485.415,-	Rp. 116.149.188.347,-	57,73%
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.008.083.600,-	Rp. 1.670.031.824,-	79,98%
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 930.380.800,-	Rp. 487.073.102,-	52,35%
Jumlah		Rp. 206.561.096.165,-	Rp. 119.839.733.319,-	58,01%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda & Bpkpd KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 119.839.733.319,- dari anggaran sebesar Rp 206.561.096.165,-. Realisasi keuangan sebesar 58,01% dibandingkan dengan capaian kinerja, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

➤ Opini BPK RI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021. Tanggung Jawab BPK adalah memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Karena BPK baru merelase hasil evaluasi tahun 2023 pada bulan Mei/Juni setiap tahun berjalan sehingga asumsi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ini menggunakan hasil evaluasi terakhir pada Tahun 2022. Opini WTP tercapai 100% sesuai target RPJMD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika data capaian tahun 2022 ini disandingkan dengan capaian atas indikator pada tahun 2026 maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka mempertahankan nilai opini WTP sangat berhasil.

Disamping itu penilaian opini secara tidak langsung juga mempresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Terhadap capaian ini, seluruh pimpinan berkomitmen dan bertekad agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bisa mempertahankan WTP untuk masa mendatang.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempertahankan WTP adalah dengan senantiasa melakukan perbaikan system, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan selain beberapa upaya lainnya yang telah dilakukan seperti perbaikan dalam pengelolaan asset tetap di perangkat daerah, perbaikan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi dengan transaksi non tunai.

Pencapaian kinerja tahun 2023 diperkirakan tetap sama dengan kinerja pada tahun 2022, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2023.

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran sampai tahun ini dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi tahun 2022 sudah mencapai target dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Namun masih sangat diperlukan komitmen Bupati dan Seluruh jajarannya untuk mempertahankan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 23.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 25.496.180.247,-	Rp. 23.659.830.486,-	92.80%

2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 201.183.485.415,-	Rp. 116.149.188.347,-	57.73%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.008.083.600,-	Rp. 1.670.031.824,-	79.98%
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 930.380.800,-	Rp. 487.073.102,-	52.35%
Jumlah		Rp. 229.698.130.062,-	Rp. 141.966.123.759,-	61.81%

Sumber data: Program Kegiatan Bpkpd KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 141.966.123.759,- dari anggaran sebesar Rp. 229.698.130.062,-. Realisasi keuangan sebesar 61.81% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 38.19%.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 19 OPD se-Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan tabel 21 realisasi IKM tahun 2023 lebih baik dibandingkan IKM tahun 2022. Pada tahun 2022 IKM kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 80.69 point, sementara IKM ditahun 2023 85,16 Poin, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 89.78% ini juga masih dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari 19 OPD se-Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

TABEL 24.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden (Orang)	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	9	87.04	Baik
2.	Sekretariat DPRD	45	78.64	Baik
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	200	84.13	Baik
4.	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	5	81.67	Baik
5.	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	23	89.49	Sangat Baik
6.	Dinas Perikanan, pertanian dan pangan	22	95.08	Sangat Baik
7.	Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	35	83.17	Baik
8.	Dinas Kependudukan dan pencatansipil	45	82.84	Baik
9.	Diskominfotik	21	85.05	Baik
10.	DKUMPP	52	90.06	Sangat Baik
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19	87.43	Baik
12.	BKPSDM	9	80.25	Baik
13.	BPKPD	70	86.83	Baik
14.	Kec. Siantan Timur	9	91.05	Sangat Baik
15.	Kec. Palmatak	13	78,99	Baik
16.	Kec. Jemaja	17	86,11	Baik
17.	Kelurahan Tarempa	22	89,27	Sangat Baik
18.	RSUD Palmatak	7	83,73	Baik
19.	Puskesmas Palmatak	7	76,59	Baik

Sumber data: Laporan SKM Kab. Kepulauan Anambas 2023

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dijabarkan, maka nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 19 Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 85,16 (BAIK/B). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey tersebut adalah sebagai berikut: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini tentu sangat jauh dari kata sempurna dan bernilai sebagai suatu naskah akademik. Mulai dari teknik sampling yang belum sesuai Peraturan Menteri PAN-RB, karena seluruh responden diambil daripada pengunjung yang datang ke kantor perangkat daerah maupun survei online selama periode survei. Sehingga

tidak dapat ditentukan nilai margin of error. Kemudian, pengumpulan data dilakukan secara mandiri oleh tim anggota dari perangkat daerah sehingga ada kemungkinan kecederungan untuk bias.

Namun dari segala kekurangan diatas, laporan ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis data dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat. Serta menjadi bahan pemberdayaan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya diharapkan agar setiap perangkat daerah dan unit pelayanan teknis agar dapat melakukan survei kepuasan masyarakat sejak awal tahun dan dilaporkan secara berkala.

3.2.8 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator Indeks Inovasi Daerah mencapai 95,48% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 25.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Inovasi Daerah	33.28	(45)	(42.97)	95.48%	Inovatif (56)	76,73%
Rata-Rata Capaian Kinerja				95.48%		76,73%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bidang Litbang Balitbangpeda KKA

➤ Indeks Inovasi Daerah

Dalam perhitungan Indeks Inovasi Daerah terdapat 3 Jenis Inovasi yang menjadi penilaian yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi

Bentuk Lainnya dengan jenis inovasi berupa Digital dan Non Digital. Berdasarkan table diatas capaian indeks inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 42.97. Jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 33,28 terjadi peningkatan terhadap inovasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi.

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mewujudkan inovasi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDA);
- b. Kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan inovasi;
- c. Dalam mewujudkan inovasi daerah Perangkat Daerah belum menerima Bimbingan Teknis sebagai upaya memperdalam pengetahuan terhadap inovasi daerah.

Solusi untuk meningkatkan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Training kepada Perangkat Daerah sebagai upaya memperdalam inovasi

daerah yang dapat dikembangkan.

Untuk meningkatkan kualitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana peunjang dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Inovasi Daerah.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 26.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 666.703.220.-	Rp. 232.782.149,-	34,92%
	Jumlah	Rp. 666.703.220.-	Rp. 232.782.149,-	34,92%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda KKA. 2023

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 232.782.149,- dari anggaran sebesar Rp. 666.703.220,- atau 34,92%. Realisasi keuangan sebesar 34,92% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,48%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut.

3.2.9 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Profesional ASN

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 52 point dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 64.39 point, persentase ketercapaian di tahun

2023 adalah sebesar 123,82% dan ini termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 107.31% ini juga masih dalam kategori sangat tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

TABEL 27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Profesional ASN	49.48	52	64.39	123.82%	60	107,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja				123.82%	60	107,31%

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indeks Profesionalitas ASN, nilai realisasi capaian diperoleh dari pengukuran dimensi kualifikasi dengan bobot (20,19) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kompetensi dengan bobot (15,12) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kinerja diperhitungkan sebesar (24,08) dari nilai pengukuran keseluruhan, dan dimensi disiplin diperhitungkan sebesar (5,00) dari nilai pengukuran keseluruhan. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas di perhitungkan melalui formulasi penjelasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Profesionalitas ASN} &= \text{Kompetensi} + \text{Kualifikasi} + \text{Kinerja} + \\
 &\quad \text{Disiplin} \\
 &= 20,19 + 15,12 + 24,08 + 5,00 \\
 &= 64,39
 \end{aligned}$$

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan profesionalitas pegawai ASN dalam kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat

pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks Profesionalitas ASN antara lain adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran dari pada ASN untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya;
- b. Tingginya biaya pelaksanaan diklat teknis juga menjadi salah satu kendala dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Keterbatasan Anggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi ASN untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya melalui diklat.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelatihan secara daring untuk memenuhi hak PNS minimal 20 JP dalam 1 Tahun;
- b. Melakukan sosialisasi kepada ASN terkait tentang Pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang diselenggarakan melalui diklat dengan tujuan peningkatan kompetensi ASN dalam rangka mewujudkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki ASN untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan;
- c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus memantau dan melakukan pembinaan untuk Diklat yang telah dilaksanakan oleh ASN sehingga hal tersebut dapat menjadikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mampu meningkatkan nilai Profesionalitas ASN itu sendiri;
- d. Melaksanakan Identifikasi atas Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagai bahan evaluasi terhadap Kompetensi ASN.

Untuk meningkatkan kualitas Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 28.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya kualitas Profesionalitas ASN

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota	Rp. 6.389.574.372,-	Rp. 6.149.738.130,-	96,25%
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.830.868.750,-	Rp. 1.175.332.542,-	64.20%
3.	Program Pengembangan SDM	Rp. 348.888.990,-	Rp. 339.314.949,-	97.26%
Jumlah		Rp. 8.569.332.112,-	Rp. 7.664.385.621,-	89.44%

Sumber data: Program Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas

Realisasi total anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.664.385.621,- dari anggaran sebesar Rp. 8.569.332.112,-. Jika realisasi keuangan 89.44% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123.82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran.

3.2.10 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Status Kemandirian Desa” dengan indikator Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri mencapai 100% dan ini merupakan predikat “**Tinggi**” kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 106.12% ini juga dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 29.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Desa Berkembangkan Menuju Desa Mandiri	67,30	94.23	100%	106.12%	94.23	106.12%
Rata-Rata Capaian Kinerja				106.12%	-	106.12%

Sumber data: DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil jumlah desa berkembang yang dibina dibandingkan dengan jumlah desa di Kecamatan. Desa berkembang menuju desa mandiri merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan Indeks Membangun Desa (IDM) Di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diukur melalui Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan - permasalahan sebagai beriku:

- a. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Desa optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa;
- h. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;
- i. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi;
- j. Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- k. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
- l. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- m. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan;
- n. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif;
- o. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun solusi untuk meningkatkan indeks desa membangun (IDM) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah akan melakukan identifikasi terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun;
- b. Melakukan Sosialisai Mendasar kepada Pemerintah Desa atas

Mekanisme Penilaian dan Pemenuhan Indeks Desa Membangun sebagai upaya Peningkatan IDM Kabupaten Kepulauan Anambas;

- c. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terhadap Rekomendasi Solusi atas Permasalahan dan Kendala Peningkatan Indeks Desa Membangun.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 30.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Status Kemandirian Desa

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pogram Penataan Desa	Rp. 18.660.000,-	Rp. 17.900.000,-	95,93%
2.	Program Peningkatan kerja sama desa	Rp. 37.378.000,-	Rp. 27.496.800,-	73,56%
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 508.139.580,-	Rp. 382.566.500,-	75,29%
Jumlah		Rp. 564.177.580,-	Rp. 427.963.300,-	81,59%

Sumber data: Program Kegiatan DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp427.963.300,- dari anggaran sebesar Rp. 564.177.580,- atau 81,59%. Jika realiasasi keuangan 81,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 18,41%.

3.2.11 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan lima indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 31.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2021-2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	63.76%	59.55%	68.28%	114.65%	65.93%	103,56%
Persentase rumah tinggal bersanitasi	14.26%	49.50%	49.50%	100%	55.15%	89.75%
Persentase ketersediaan rumah layak huni	16%	40%	9,70%	24.25%	100%	9,7%
Persentase permukiman yang tertata	18.29%	40%	18,29%	45,72%	100%	18,29%
Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	31.83%	34.37%	34.61%	100.69%	46.34	74.68%
Rata-Rata Capaian Kinerja				77.06%	-	-

Sumber data: DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2023

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal fisik masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Adapun penjabaran dari hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas meliputi:

➤ **Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung SPM diantaranya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana

air minum agar ketersediaan air bersih yang aman dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kepulauan Anambas. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Kinerja ” Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak” dengan target 59.55% dan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 68,28% dengan capaian kinerja sebesar 114,65% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan realisasi 63,76 terjadi peningkatan terhadap proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.

➤ **Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 49,50% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 49,50% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% dengan predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 89,75%. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/ drainase dan sampah. Dalam perhitungan capaian kinerja sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ini yang dihitung hanya layanan air bersih yang dapat diakses oleh rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sanitasi merupakan salah satu sarana prasarana dasar permukiman yang harus dimiliki setiap rumah. Sanitasi pada setiap rumah tangga juga menentukan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah Daerah yang ditargetkan mencapai 100%.

➤ **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 40% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 9,70% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 24,25% dengan predikat “**Rendah**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 9,7%.

➤ **Persentase Permukiman yang tertata**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 40% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 18,29% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 45,72% dengan predikat “**Rendah**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 18,29%.

➤ **Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 34,37% untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 34,61% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100,69% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 74,68% ini juga masih dalam kategori tinggi dan membutuhkan sebesar 25,32% untuk

mencapai kategori sangat tinggi dan baru bisa dikategorikan pecapaian berhasil.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 32.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur Dasar

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	Rp. 19.338.152.844,-	Rp. 15.535.500.746,-	80,34%
2.	Program Pengelolaan SDA	Rp. 7.374.558.659,-	Rp. 6.179.363.962,-	83,79%
3.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 2.988.777.495,-	Rp. 2.333.689.660,-	78,08%
4.	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp. 707.120.514,-	Rp. 81.540.390,-	11,53%
5.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 374.800.000,-	Rp. 295.072.000,-	78,73%
6.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp. 1.224.057.491,-	Rp. 1.012.328.468,-	82,70%
7.	Program pengembangan permukiman	Rp. 1.345.665.637,-	Rp. 1.341.991.408,-	99,73%
8.	Program Penataan bangunan gedung	Rp. 37.353.236.988,-	Rp. 27.662.888.532,-	74,06%
9.	Program penyelenggaraan jalan	Rp. 92.265.918.674,-	Rp. 69.867.525.498,-	75,72%
10.	Program penataan bangunan dan lingkungan	Rp. 357.478.200,-	-	-
11.	Program penyelenggaraan jasa konstruksi	Rp. 149.998.000,-	-	-
12.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp. 2.840.000.000,-	Rp. 280.889.532,-	9,89%
13.	Program pengembangan perumahan	Rp. 1.723.082.460,-	Rp. 1.581.257.460,-	91,77%
14.	Program kawasan permukiman	Rp. 1.850.000.000,-	Rp. 96.685.433,-	5,23%
15.	Program peningkatan sarana, prasarana (PSU)	Rp. 34.589.170.674,-	Rp. 14.768.599.550,-	42,70%
16.	Program pengelolaan izin lokasi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 134.908.326,-	67,45%
17.	Program penatagunaan tanah	Rp. 100.000.000,-	Rp. 3.500.000,-	2,50%
Jumlah		Rp. 204.782.017.636,-	Rp. 141.374.609.106,-	80,34%

Sumber data: Program Kegiatan DPUPRPRKP Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 141.374.609.106,- dari anggaran sebesar Rp. 204.782.017636,-. atau 80,34%. Jika realisasi keuangan

80.34% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 77.06%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 3,28%.

3.2.12 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 12: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemerataan pembangunan antar pulau dan pesisir” dengan dua indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.83	0.74	0.58	78.37%	1	58%
Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.33	0.67	0.33	49.25%	1	33%
Rata-Rata Capaian Kinerja				63,81	-	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir” dengan indikator Indeks Rasio Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 0,74 untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 0,58 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 78,37,92% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”.

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

Rumus

Rasio konektivitas Kabupaten : (IK1 x bobot angkutan jalan) +
(IK2 x bobot angkutan sungai,
danau dan penyeberangan)

IK1 (angkutan jalan) : (jumlah trayek yang dilayani x

Bobot trayek) dibagi jumlah
 Kebutuhan trayek)
 IK2 (angkutan SDP) : (jumlah lintas penyeberangan x
 bobot lintas) dibagi jumlah lintas
 penyeberangan

Tahun 2023

- Jumlah trayek (angkutan jalan) yang dilayani = 0
 Jumlah target trayek yang dilayani = 0
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi = 26
 Jumlah target lintas penyeberangan yang beroperasi = 31

Bobot Lintas (angkutan penyeberangan) = 1

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :
 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan
 lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan
 SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30

IKK	IK 1	IK 2
Rasio Konektivitas Kabupaten	IK1 x bobot angkutan jalan = 0	IK2 x bobot angkutanSDP $\frac{26 \times 1}{31} = 0,83$ $0,83 \times 0,7 = 0,58$
0,58		
IKK	Jenis Data	Rumus
Kinerja lalu lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab.kota ----- x 100 % Target kebutuhan perlengkapan jalan kab.kota 4 ----- x 100 % 17 = 0,24

Target jumlah lintasan angkutan laut dalm Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023 adalah : 31

Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah konektivitas yg melayani antar pulau}}{\text{Jumlah konektivitas secara keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{26}{31} \times 100\%$ $= 83,8 \%$ Rasio : $83,8 / 100 = \mathbf{0,83}$
----------------------------------	---

Sedangkan Hasil pengukuran capaian kinerja dengan indikator Indeks Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 0,67 untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 49,25% dan ini termasuk predikat “**Sedang**”.

TABEL 34.
Lintas Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten

No	Lintas Angkutan Penyeberangan	Keterangan
1	Kampung Baru – Air Asuk	Kapal <i>Ro-Ro</i>
2	Batu Belah – Temburun	Kapal <i>Ro-Ro</i>

Target jumlah lintas angkutan penyeberangan dalam Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023 adalah : 6

Lintas Angkutan Penyeberangan yang belum realisasi :

1. Air Bini – Penebung (*DED*)
2. Peninting – Konjo (*DED*)
3. Jemaja – Jemaja Barat
4. Matak – Pian Pasir

Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah konektivitas yg melayani penyeberangan}}{\text{Jumlah konektivitas secara keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{2}{6} \times 100\%$ $= 33,33 \%$ Rasio : $33,33 / 100 = \mathbf{0,33}$
---	--

Sistem konektivitas angkatan laut dan penyeberangan yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah kepulauan yang sering terjadinya aktivitas masyarakat yang menyeberang ke pulau lainnya. Beberapa problem permasalahan transportasi laut di daerah kepulauan sering terabaikan dan belum terselesaikan dengan baik.

Penyesuaian problem transportasi dan aksesibilitas perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih *case by case problem solving*. Pembentukan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi dan tentu saja konsisten, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi laut dan penyeberangan antar pulau. Angkutan antar pulau memegang peran penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di kepulauan karna dalam fungsinya transportasi laut menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari/ke pulau lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan.

Adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan antar pulau. Tingkat kelancaran moda transportasi antar pulau antar desa

dan wilayah yang menghubungkan ke ibu kota Kabupaten sudah terlayani sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan.

Berikut data transportasi laut pulau antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas:

TABEL 35.
Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TRAYEK LINTASAN ANGKUTAN LAUT	KETERANGAN
1	Candi - Tarempa	Speed Boat
2	Piabung - Air Asuk	Speed Boat, Pompong
3	Tebang - Tarempa	Pompong
4	Putik - Ladan -Tarempa	Speed Boat
5	Kec. Kute Siantan - Tarempa	Speed Boat
6	Matak - Tarempa	Speed Boat, Pompong
7	Pian Pasir - Tarempa	Speed Boat
8	Piasan - Tarempa	Speed Boat
9	Air Asuk - Piabung	Speed Boat
10	Air Sene - Tarempa	Speed Boat
11	Teluk Sunting - Tarempa	Pompong
12	Nyamuk - Tarempa	Pompong
13	Munjan - Tarempa	Pompong
14	Batu Belah - Temburun	Ro-Ro
15	Kampung Baru - Air Asuk	Ro-Ro
16	Tarempa – Matak Kecil	Pompong
17	Nyamuk - Teluk Rung – Serat - Air Putih - Tarempa	Pompong
18	Kuala Maras – Telaga – Tarempa	Pompong
19	Kuala Maras – Tarempa	Pompong
20	Impul – Kusik	Pompong
21	Bayat – Tarempa	Pompong
22	Palah – Tarempa	Pompong
23	Kiabu – Tarempa	Pompong
24	Telaga – Telaga Kecil – Tarempa	Pompong
25	Mengkait – Tarempa	Pompong
26	Pian Pasir – Tarempa	Pompong

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Selain Kapal Motor (KM), di Kabupaten Kepulauan Anambas juga ada transportasi laut berupa *speed boat*, pompong yang memiliki izin trayek. Selain itu ada juga transportasi lokal dengan 22 rute pengangkutan jasa transportasi anak sekolah antar pulau sudah terpenuhi dengan baik.

Untuk menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Telah tersedia sarana penunjang transportasi laut dan udara baik melalui pelabuhan Sri Bintan, pelabuhan Telaga punggur Batam, Kijang serta Bandara Matak dan Bandara letung sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini. Adapun rute penerbangan dari Bandara Batam terdapat 2 Armada Pesawat Udara WINGS AIR yang beroperasi 4 kali dalam seminggu, dengan Rute Letung – Batam, kemudian penerbangan dari Bandara Matak- Batam/Matak-Tanjung Pinang 1 armada yang dilayani armada pesawat udara Express Air, dengan jenis pesawat Foker-50 yang berkapasitas 50 orang penumpang.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD dapat dilihat persentase capaian kinerja untuk indikator di atas sudah tercapai semua di tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi, sudah tidak ada lagi daerah terisolir dan untuk transportasi sudah tersedia dan terpenuhi secara lancar.

Untuk meningkatkan kualitas konektivitas penyeberangan laut Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana pelabuhan penyeberangan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang ruang tunggu bagi penumpang, personil bagian mengelola pelabuhan, pembangunan pagar, dan lain sebagainya.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 36.
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Rp. 37.777.441.017,-	Rp. 28.172.759.140,-	74.58%
2.	Program Penyelenggaraan lalu lintas Angkutan jalan (LLAJ)	Rp. 15.055.533.216,-	Rp. 11.078.746.775,-	73.59%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 8.604.144.184,-	Rp. 4.718.226.002,-	54.84%
	Total	Rp. 61.437.118.417,-	Rp. 43.969.731.917,-	71.56%

Sumber: Program Kegiatan DISHUBLH KKA T.A 2023

Program dan kegiatan yang di prioritaskan untuk meningkatkan sasaran kinerja ini di alokasikan total anggaran sebesar Rp. 61.437.118.417,-dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp. 43.969.731.917,-, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran dengan indikator rasio konektivitas angkutan laut dan rasio konektivitas angkutan penyeberangan dengan capaian 63.81%, maka tingkat efisiensi dan efektivitas belanja anggarannya sebesar 7.75 % dari penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3.2.13 Analisis Kinerja Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi” dengan Indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai” Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk predikat “**Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase titik lokasi / desa terlayani telepon seluler dan atau internet yang memadai	85.18	100%	100%	100%	100	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%	-	100%

Sumber: DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai ditargetkan dengan nilai 100% dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, persentase ketercapaian di tahun 2023 adalah sebesar 100% dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% ini juga masih dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

Secara umum program-program di bidang Cakupan layanan telekomunikasi masih bisa terlaksana dengan baik, seperti Deseterlayani telepon seluler serta internet yang memadai. Adapun titik lokasi Desa terlayani telepon seluler dan atau internet memadai dari 54 Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mencapai 100% untuk kategori terlayani telepon seluler.

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif diperlukan strategi terukur, antara lain:

- a. Meningkatkan pemantauan evaluasi, dan pelaporan secara intens terkait penyediaan konten, pengelolaan media, penguatan kapasitas komunikasi publik, dan penyediaan layanan informasi;
- b. Perlu adanya Sekretariat PPID dalam bentuk pelayanan offline di admin utama maupun admin pembantu sehingga dalam menjalankan kewajibannya diharapkan menjadi lebih aktif dan optimal;
- c. Lebih diperkuat sinergitas untuk urusan dokumentasi dan publikasi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bagian Protokol Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah;
- d. Untuk mencapai Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Daerah perlu dilakukan evaluasi melalui tim SPBE tingkat Kabupaten;
- e. Mempercepat pengesahan terkait Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE;
- f. Memanfaatkan Gedung NOC untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah agar tetap terlayani;
- g. Meningkatkan intensitas koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam mencapai target program prioritas RPJMD Anambas Merdeka Sinyal 2023;
- h. Mendorong Penyelenggara Yelekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan akses telekomunikasi seiring peningkatan

kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan TIK;

- i. Lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder pengguna data terhadap data sektoral yang sudah di publikasikan melalui website statistik dan buku statistik sektoral;
- j. Membuat kajian-kajian ataupun survey dalam mendukung peran Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi;
- k. Melakukan Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi pemenuhan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
- l. Mempercepat pembuatan regulasi penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Anambas; dan
- m. Mempercepat proses pengurusan perizinan Frekuensi Radio VHF Daerah.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 38.
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Cakupan Layanan Telekomunikasi

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.771.413.334,-	Rp. 4.516.930.918,-	78.26%
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.791.442.027,-	Rp. 3.338.505.946,-	69.68%
3.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp. 282.987.600,-	Rp. 175.616.069,-	62.06%
	Jumlah	Rp. 10.845.842.961,-	Rp. 8.031.052.933,-	74.04%

Sumber: Program Kegiatan DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2023

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 8.031.052.933,- dari anggaran sebesar Rp. 10.845.842.961,-. atau 74.04%. Jika realisasi keuangan 74,04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 25,96%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas ekonomi daerah. Semakin banyak kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dana transfer untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 diarahkan pada peningkatan dua strategi peningkatan pendapatan daerah yakni intensifikasi, dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi daerah diarahkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan:

- Mengintensifkan koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan akurasi perhitungan produksi migas yang dikelola perusahaan eksplorasi di wilayah Kepulauan Anambas. Perhitungan volume produksi yang akurat akan berdampak pada perhitungan dana perimbangan yang lebih akurat.
- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi perhitungan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor;
- Mengintensifkan penerimaan dari hibah atau dana community development perusahaan terutama perusahaan yang telah melakukan eksplorasi minyak selama ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengintensifkan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Ekstensifikasi pendapatan

- Menginventarisasi sumber kegiatan ekonomi yang belum diperoleh kontribusi bagi PAD;
- Melakukan inventarisasi BUMD/ BUMN yang telah melakukan kegiatan usaha ekonomi di wilayah laut dan darat Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD;
- Membangun BUMD yang dapat menjadi mitra kerja bagi perusahaan eksplorasi migas, perkebunan dan pertanian sehingga di masa mendatang dapat menyumbangkan kontribusi bagi PAD;

Upaya-upaya efektif dalam pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah

beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan kedalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan/ dana pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 39.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
per 31 Desember 2023

SASARAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
1	2	3	4
Pendapatan Daerah :	Rp. 1.149.685.355.791,-	Rp. 998.354.911.048,73,-	86,84
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 41.958.839.490,-	Rp. 29.046.886.271,73,-	69,23
Pajak Daerah	Rp. 22.559.538.746,-	Rp. 16.310.773.757,00,-	72,30
Retribusi Daerah	Rp. 4.650.745.981,-	Rp. 7.119.487.024,00,-	153,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 1.318.019.763,-	Rp. 1.596.888.717,00,-	121,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 13.430.535.000,-	Rp. 4.019.736.773,73,-	29,93
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.107.726.516.301,-	Rp. 969.308.024.777,00,-	87,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.040.879.623.479,-	Rp. 907.365.466.803,0,-	87,17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 66.846.892.822,-	Rp. 61.942.557.974,00,-	92,66
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.149.685.355.791,-	Rp. 998.354.911.048,73,-	86,84

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.KKA.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis, sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan berjenjang dari mulai tingkat desa

hingga forum perencanaan tingkat Kabupaten (MUSRENBANG) yang merupakan sebuah upaya mewujudkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri. Penekanan belanja daerah pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pilihan dialokasikan terutama untuk program pengembangan perikanan dan pariwisata sebagai basis pertumbuhan daerah maritim.

B. Target dan Realisasi Belanja

Target dan proporsi pada belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 40.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2023
per 31 Desember 2023

Sasaran	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1. Belanja Daerah :	Rp. 1.250.230.911.389	Rp. 980.267.125.829,64	78,41	Rp. 865.312.989.260,08
a. Belanja Operasi	Rp. 803.457.038.265	Rp. 683.830.310.530,64	85,11	Rp. 641.998.841.904,41
Belanja Pegawai	Rp. 368.552.961.524	Rp. 333.755.055.240,00	90,56	Rp. 309.954.956.758,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 414.841.981.749	Rp. 332.764.522.189,64	80,21	Rp. 319.255.771.970,41
Belanja Hibah	Rp. 18.616.010.962	Rp. 17.149.119.101,00	92,12	Rp. 10.231.131.676,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.446.084.030	Rp. 161.614.000,00	11,18	Rp. 2.556.981.500,00
b. Belanja Modal	Rp. 251.278.933.169	Rp. 184.291.542.980,00	73,34	Rp. 118.750.062.060,67
Belanja Modal Tanah	Rp. 145.000.000	Rp. 0.00	0,00	Rp. 80.343.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 61.659.873.476	Rp. 51.188.694.187,00	83,02	Rp. 30.844.533.914,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 45.485.585.922	Rp. 34.500.354.929,00	75,85	Rp. 32.410.556.800,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 142.355.782.311	Rp. 96.909.592.427,00	68,08	Rp. 54.715.582.946,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.632.691.460	Rp. 1.692.901.437,00	103,69	Rp. 699.045.400,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 68.799.839.255	0	0,00	0
Belanja Tak Terduga	Rp. 68.799.839.255	0	0,00	0
2. Belanja Transfer	Rp. 126.695.100.700	Rp. 112.145.272.319,00	88,52	Rp. 104.564.085.295,00
Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.750.000.000	Rp. 2.261.732.289,00	82,24	Rp. 1.816.890.385,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 123.945.100.700	Rp. 109.883.540.030,00	88,66	Rp. 102.747.194.910,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.250.230.911.389	Rp. 980.267.125.829,64	78,41	Rp. 865.312.989.260,08

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. KKA.

3.3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tahun 2023 telah menganggarkan belanja sebesar Rp. 980.267.125.829,64 yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp. 683.830.310.530,64, dan belanja modal sebesar Rp. 184.291.542.980,00, Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebesar Rp 980.267.125.829,64 atau sebesar 78,41% dari anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp 1.250.230.911.389.

